

15 Penjudi Pilkades Pati Ditangkap



KR-Alwi Alaydrus

Kapolres Pati AKBP Arie Prasetya Syafaat menunjukkan tersangka dan barang bukti judi Pilkades yang berhasil diamankan.

PATI (KR) - Bayang-bayang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak akan diganggu 'botoh', kemungkinan tidak terjadi. Menyusul ditangkapnya 15 orang penjudi oleh Satgas Anti Money Politics Polres Pati. Kapolres Pati AKBP Arie Prasetya Syafaat SIK mengungkapkan, 15 orang 'botoh' yang ditangkap, berasal dari

wilayah Kecamatan Cluwak, Tayu, Margorejo, Wedarijaksa dan Batangan. Barang bukti uang Rp 182 juta ikut diamankan. Besaran uang judi yang berhasil diamankan dari Cluwak sebesar Rp 4 juta dengan 2 tersangka, Margorejo Rp 96 juta (3), Wedarijaksa Rp 57 juta (5), Tayu Rp 6 juta (2) dan Batangan Rp 19 juta

dengan 3 tersangka, "Di antara para tersangka, satu orang di antaranya perempuan. Ini sangat memprihatinkan" kata AKBP Arie Prasetya Syafaat, Kamis (8/4). Sebagaimana diketahui, Pilkades serentak Kabupaten Pati akan berlangsung di 215 desa, Sabtu (10/4). Untuk menghindarkan adanya permainan judi, maka Polres Pati membentuk Satgas Anti Money Politics Pilkades. AKBP Arie Prasetya Syafaat mengatakan, pelaksanaan Pilkades rawan dengan perjudian. Maka harus diantisipasi agar tidak terjadi perjudian menjelang pelaksanaan Pilkades. Dari hasil dari pemeriksaan, terungkap para penjudi mengirim uangnya ke bandar lewat rekening. Dan para botoh akan mendapatkan fee sesuai besaran uang taruhan. "Modusnya uang ditransfer di rekening bandar, dan bebotoh akan mendapatkan fee. Mereka akan dijerat pasal 303 tentang perjudian, dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara," ujar kapolres Pati. (Cuk)-d

CAPAIAN BELUM OPTIMAL

Lansia, Prioritas Vaksinasi di DIY

YOGYA (KR) - Pemda DIY terus menggenarkan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 baik bagi pelayan publik maupun Lansia. Kendati demikian, untuk vaksinasi bagi lansia jumlahnya masih perlu terus ditingkatkan. Karena sampai saat ini baru 12,82 persen lansia yang sudah divaksinasi. Padahal jumlah total lansia yang teregistrasi untuk vaksinasi sebanyak 590.892 orang. "Kalau untuk dosis pertama jumlah lansia yang sudah divaksinasi 37.864 orang atau sekitar 12,82 persen. Adapun untuk dosis kedua baru 3.956 lansia, tapi jumlah ini masih terus bergerak. Untuk itu sejumlah upaya terus kami lakukan untuk mendorong dan menyukseskan pelaksanaan vaksinasi bagi lansia," kata Kepala Dinas Kesehatan DIY Pembajun Setyaningastutie di Jogja Expo Center (JEC), Kamis (8/4). Pembajun mengatakan, belum optimalnya vaksinasi bagi lansia dikarenakan beberapa faktor. Karena untuk pelaksanaan vaksinasi

lansia, ketentuannya harus dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes). Padahal karena kondisi fisik, ada beberapa lansia yang tidak bisa datang ke Fasyankes. Selain itu, ada sejumlah lansia gagal vaksinasi karena memiliki komorbid seperti hipertensi, penyakit jantung, dan diabetes. "Idealnya kalau sesuai pedoman, untuk vaksinasi bagi lansia dilakukan di Fasyankes. Tapi karena kondisi (keterbatasan fisik) beberapa di antara mereka tidak bisa datang, seandainya dapat harus diantar. Untuk mempercepat vaksinasi bagi lansia, kami mencoba lewat vaksinasi massal," ujar Pembajun. Menurut Juru Bicara Pemda DIY untuk Penanganan Covid-19 Berty Murtiningsih, kasus terkonfirmasi Covid-19 harian di DIY masih bertambah 220 kasus, menjadi 35.003 kasus pada Kamis (8/4). Pasien sembuh bertambah 210 menjadi 29.209 orang. Sedangkan kasus meninggal bertambah lima kasus menjadi 840 kasus. (Rial/ra)-d

6-17 Mei, Sambungan hal 1

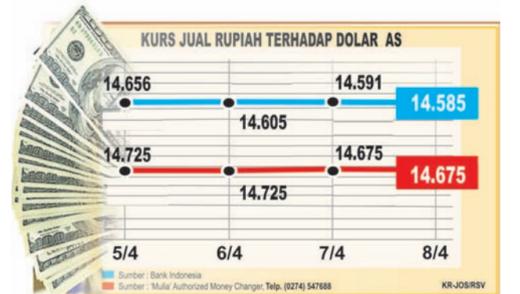
Kemudian kendaraan bermotor perseorangan dengan jenis mobil penumpang, mobil bus, sepeda motor, dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan. Meski demikian Kemenhub memberikan sejumlah pengecualian bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan dalam waktu tersebut, di antaranya Aparatur Sipil Negara (ASN), karyawan BUMN/BUMD, TNI/Polri, dan karyawan swasta yang bekerja atau melakukan perjalanan dinas dengan dilengkapi surat tugas. Kemudian, kunjungan keluarga yang sakit, kunjungan duka anggota keluarga yang meninggal dunia, ibu hamil dengan satu orang pendamping, dan kepentingan melahirkan dengan maksimal dua orang pendamping, serta pelayanan kesehatan darurat. Adapun kendaraan yang diperbolehkan beroperasi, menurut Budi, kendaraan pimpinan lembaga tinggi negara, dinas operasional TNI/Polri, petugas jalan tol, ambulans, pemadam kebakaran, dan mobil barang. Kemudian kendaraan yang mengangkut repatriasi pekerja migran, pelajar, dan mahasiswa Indonesia yang berada di luar negeri. Selanjutnya, diatur pula wilayah lingkungan perkotaan yang masih boleh dibuka, di antaranya Kota Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo. Kemudian semua wilayah perkotaan di Jabodetabek, Bandung Raya,

Semarang, Kendal, Demak, Ungaran, Purwodadi, Yogyakarta, Solo Raya, Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Makassar, Sungguminasa, Takalar, dan Maros. "Pengawasannya akan dilakukan oleh Polri dibantu TNI, Satpol PP, dan Dishub dengan membuat pos-pos checkpoint di beberapa daerah," kata Budi. Pada sektor angkutan penyeberangan, diberlakukan pengecualian bagi penyeberangan Merak-Bakauheni, Ketapang-Gilimanuk, Padang Bay-Lembang, dan Kayangan-Poto Tano yang mengangkut kebutuhan logistik, bahan pokok, dan mengangkut obat-obatan. Budi menambahkan, pihaknya juga mengatur sanksi bagi masyarakat yang melanggar ketentuan tersebut. "Seperti tahun lalu, masyarakat yang tidak memenuhi ketentuan perjalanan akan diputar balik, tetapi bagi kendaraan travel yang digunakan mengangkut penumpang akan ditilang oleh Polri," katanya. Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, ketentuan larangan mudik juga di-tuangkan dalam Surat Edaran Kepala Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik pada Bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah. (Ant)-d

Candi Sambungan hal 1

dihilangkan lumut dan kerak di bebaturan. "Ini merupakan salah satu inovasi penting dari BKB, yang selama beberapa tahun melakukan proses riset pengembangan teknologi ini, dan sekarang sudah cukup mantap. Minyak ini sudah diuji di batu lepas, dan sekarang bisa diaplikasikan di batu Candi Borobudur. Dibandingkan zat kimia, keunggulan minyak atsiri serai wangi ini merupakan zat organik. Jadi jauh lebih aman, ramah lingkungan dan aromanya wangi," jelasnya. Dari segi harga, menurut Hilmar, juga sangat hemat. Tanaman serai wangi mudah tumbuh di lingkungan masyarakat. Dengan menanam serai wangi, masyarakat secara tidak langsung dapat menghasilkan minyak atsiri, dan dapat diolah sendiri. "Ini ekosistem perlindungan cagar budaya yang sangat efektif," katanya. Dikatakan, Indonesia memiliki banyak candi, yang juga memiliki problem serupa Candi Borobudur. Karena itu, tidak menutup kemungkinan memerluk teknologi ini juga. Tim BKB juga sudah memproses untuk mendapatkan hak paten, serta menyerah-

kan haknya kepada negara untuk mengelolanya. Pamong Budaya Ahli Ma-dya BKB Nahar Cahyandaru mengakui, dulu pembersihan lumut menggunakan bahan kimia. Kemudian UNESCO minta penggunaan bahan kimia dihentikan karena tidak ramah lingkungan dan dikawatirkan berbahaya untuk jangka panjang, mengingat sifatnya agak asam. Pada masa peralihan dari penggunaan zat kimia ke organik, pembersihan dilakukan secara manual. Kini sudah beralih menggunakan minyak atsiri. Setelah disemprot minyak atsiri, bagian yang disemprot ditutup lembaran plastik sekitar dua hari, sebelum dilakukan proses pembersihan. (Tha)-d



Prakiraan Cuaca		Jumat, 9 April 2021				
Lokasi	Pagi	Siang	Malam	Dini Hari	Suhu C	Kelembaban
Bantul					23-31	65-95
Sleman					23-31	65-95
Wates					23-31	65-95
Wonosari					23-31	65-95
Yogyakarta					23-31	65-95

DEWAS KPK KIRIM SURAT KE PRESIDEN

Minta Pengganti Artidjo

JAKARTA (KR) - Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengirim surat resmi kepada Presiden Joko Widodo untuk mencari pengganti Artidjo Alkostar. Seperti diketahui, anggota Dewas KPK Artidjo Alkostar meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 2021 di kediamannya sehingga saat ini Dewas KPK periode 2019-2023 beranggotakan Tumpak Hatorangan Panggabean, Albertina Ho, Syaamsuddin Haris, dan Harjono. "Sehubungan hal itu, kami telah

menyampaikan (permohonan) itu kepada Presiden karena akan ditentukan oleh Presiden dan ditetapkan oleh Presiden dalam Keputusan Presiden (Keppres)," kata Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (8/4). Dijelaskan, dalam Pasal 37A Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

(UU KPK) disebutkan bahwa Dewan Pengawas KPK berjumlah lima orang. Untuk itu, perlu segera ada penggantinya Artidjo. "Untuk itu, permohonan sudah kami sampaikan. Sampai sekarang kami belum menerima surat keputusan itu. Hal ini tentunya masih berproses di Sekretariat Negara," tutur Tumpak. Anggota Dewan Pengawas dalam UU KPK disebut bahwa memegang jabatan selama empat tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. (Ful)-d

Rem Sambungan hal 1

Badan trailer bisa dipindah dan arus lalu lintas mulai terurai menjelang petang. "Proses pembersihan terus dilakukan, sehingga kemacetan tidak berlangsung lama. Sebab jalur itu merupakan akses utama dari

Purworejo menuju Magelang dan kota-kota lain di bagian utara," terangnya. Kapolres mengimbau pengguna jalan akses Purworejo-Magelang waspada ketika melintasi akses itu. "Jalan

ini dikenal jalur tengkorak karena banyak tikungan dan turunan tajam. Maka harus hati-hati serta selalu mengecek kondisi kendaraan sebelum melewatinya," tegasnya. (Jas)-d

Curi Sambungan hal 1

barang bukti karena dia seorang anggota juga di situ, anggota satgas, sehingga dia bisa mengambil barang bukti. Barang bukti dalam perkara Yaya Purnomo yang sekarang sudah menjadi barang rampasan yang harus kami lelang untuk negara," kata Tumpak Panggabean. Purnomo adalah bekas kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. Ia menyatakan, sebagian

dari barang bukti yang sudah diambil tersebut yang dikategorikan sebagai pencurian atau penggelapan itu digadaikan IGAS. "Karena yang bersangkutan memerlukan sejumlah dana untuk membayar utang-utangnya. Cukup banyak utangnya karena ternyata yang bersangkutan ini terlibat dalam satu bisnis yang tidak jelas," ujarnya. Amar putusan Dewan Pengawas adalah, yang bersangkutan melakukan suatu pelanggaran kode etik tidak jujur, menyalahgunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadinya dan ini adalah

suatu pelanggaran dari nilai-nilai integritas yang diatur sebagai pedoman perilaku untuk seluruh insan KPK. "Karena perbuatannya menimbulkan dampak yang sangat merugikan dan berpotensi terjadinya juga kerugian keuangan negara dan sudah terjadi. Bahwa citra KPK sebagai orang kenal memiliki integritas tinggi sudah terdampai oleh perbuatan yang bersangkutan ini. Oleh karena itu, Majelis memutuskan, yang bersangkutan perlu dijatuhi hukuman berat, yaitu memberhentikan yang bersangkutan dengan tidak hormat," kata Tumpak Panggabean. (Ant)-f

PTM Sambungan hal 1

Terkait itu, ada beberapa catatan atas PTM yang (akan) dilaksanakan. Pertama, sebaiknya perlu ada uji coba PTM di sekolah atau madrasah. Uji coba PTM itu penting, mengingat selama ini para guru dan siswa terkondisikan proses belajar-mengajar (PBM) secara daring. Untuk itu, di dalam uji coba PTM ini pihak sekolah atau madrasah perlu mempersiapkannya secara detail. Misalnya, kursi dan meja per siswa berjarak minimal 1 meter di ruang kelas. Kedua, sebaiknya pihak sekolah atau madrasah perlu mempersiapkan dua kanal pembelajaran (KR, 5/4). Dua kanal pembelajaran yang dimaksud ialah PTM dan PJJ. Bagi siswa yang sehat dan mendapatkan izin dari orangtua, dapat mengikuti PTM di sekolah atau madrasah. Sebaliknya, bagi siswa yang kurang sehat dan kurang mendapatkan izin dari orangtua, dapat mengikuti PJJ di rumah. Dua kanal pembelajaran ini sangat penting dalam masa uji coba PTM.

Ketiga, selama uji coba PTM di sekolah atau madrasah, para guru, siswa, dan tenaga kependidikan (tendik) wajib menaati protokol kesehatan. Protokol kesehatan meliputi 4M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan). Hemat penulis, ketaatan dari para guru, siswa, dan tendik terhadap protokol kesehatan merupakan ikhtiar awal guna mencegah infeksi virus Covid-19 di sekolah atau madrasah. Adanya uji coba PTM, dua kanal pembelajaran, dan ketaatan terhadap protokol kesehatan di sekolah atau madrasah merupakan hal-hal penting dalam pelaksanaan PTM. Saat ini, di sejumlah daerah telah menerapkan uji coba PTM dan kelak ada evaluasi terkait hal itu. Apabila hasil evaluasi menyatakan baik, kelak uji coba PTM dapat dilanjutkan. Sebaliknya, jika hasil evaluasi menyatakan kurang baik dan ditandai adanya infeksi virus Covid-19, uji coba PTM dihentikan. Sebagai penutup, ada dua saran.

Pertama, uji coba PTM perlu didukung banyak pihak. Pihak orangtua mendukung anak-anaknya yang sehat untuk berangkat ke sekolah. Pihak guru dan sekolah mendukung siswa-siswanya untuk taat protokol kesehatan. Dan, pihak masyarakat sekitar sekolah mendukung lancarnya uji coba PTM. Saat ini, kesehatan dan pendidikan merupakan dua faktor penting sehingga semua pihak perlu menjaganya. Kedua, pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi uji coba PTM. Evaluasi itu meliputi persiapan PTM, pelaksanaan PTM, dan kesehatan guru-siswa. Tahap persiapan dan pelaksanaan PTM harus matang dan rinci, serta faktor kesehatan guru-siswa harus diperhatikan. Mudah-mudahan uji coba PTM di sekolah atau madrasah berhasil, serta membawa dampak positif bagi peningkatan capaian pembelajaran di kelas. (Penulis adalah Dosen FKIP UAD; Mahasiswa S-3 Ilmu Pendidikan Bahasa UNY)-f

Disaster Resilience Menghadapi Fenomena Bencana Multihazard



Ika Afanita S, S.Si., M.Sc
Dosen Prodi. Geografi
Fak. Sains dan Teknologi
Universitas Amikom Yogyakarta

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan bahwa bencana adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Definisi tersebut menyimpulkan bencana dapat berupa kejadian alam seperti tsunami, gempa bumi, erupsi gunung merapi, dan tanah longsor sedang-kan non

alam seperti pandemi, epide-mi, wabah penyakit, teror, gagal teknologi, dan konflik. Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak luput dari adanya ancaman bencana, apalagi bagi masyarakat Indonesia dimana merupakan negara dengan kondisi geografis terletak pada pertemuan lempeng dunia yaitu lempeng eurasia, lempeng indo australia, dan lempeng pasifik hingga disebut berada pada zona ring of fire. Akibat pergerakan lempeng dan aktivitas geologi di sekitar Indonesia menyebabkan munculnya deretan gunung api dan kondisi geomorfologi yang beranekaragam. Selain itu, akibat kondisi tersebut bencana alam juga dapat terjadi sewaktu-waktu sehingga mampu mengancam dan mengganggu aktivitas kehidupan manusia. Disisi lain, bencana non alam juga dapat mengganggu kehidupan manusia seperti wabah penyakit, pandemi, teror, dan gagal teknologi. Indonesia memiliki kondisi demografi Indonesia menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia merupakan jumlah penduduk terbesar keempat di

seluruh dunia dengan jumlah penduduk 271.350.000 jiwa, setelah China, India, dan United States. Tentu saja pemahaman akan bencana dan kesiapsiagaan akan bencana perlu dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Kejadian bencana berturut-turut terjadi di Indonesia sejak awal tahun 2021, baik bencana alam maupun non-alam. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah tercatat 1.045 kejadian bencana alam sepanjang 1 Januari hingga awal April 2021 yang menyebabkan 4.362.537 orang megungsi dan 337 orang meninggal dunia. Kejadian ini belum termasuk bencana non alam berupa pandemi covid 19 yang telah mencatat 1.550.000 orang terkonfirmasi positif covid 19 dan meninggal hingga 42.062 orang. Berbagai kejadian bencana ini menuntut masyarakat Indonesia untuk memiliki ketahanan diri dalam menghadapi bencana agar kehidupan dan aktivitas dapat tetap berjalan kembali. Menurut United Nations International Strategy for Disaster Reduction, hazard



didefinisikan sebagai sebuah kejadian, fenomena, ataupun aktivitas manusia yang memiliki potensi merusak dan dapat menyebabkan kerusakan properti, penurunan kualitas lingkungan, kerugian sosial dan ekonomi, atay bahkan kematian atau secara harafiah disebut bencana. Adapun multihazard menunjukkan gejala adanya beberapa macam bencana yang terjadi secara bersamaan, baik bencana alam maupun non alam hingga mengganggu aktifitas manusia dan menimbulkan kerugian baik dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Beberapa contoh kejadian multihazard telah dialami di beberapa wilayah di Indonesia sejak awal tahun 2021. Bencana pandemi covid 19 yang telah dialami Indonesia sejak Bulan Maret 2020 hingga kini. Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Sleman

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang berada di zona bahaya erupsi Gunungapi Merapi mengungsi hingga mencapai 1.831 jiwa akibat peningkatan status Siaga Gunungapi Merapi. Guguran awan panas bahkan telah terjadi sebanyak 111 kali sejak Januari hingga 5 Maret 2021. Potensi bahaya berupa guguran lava dan awanpanas dapat mengancam sektor selatan barat daya lereng Gunungapi Merapi, seperti Sungai Kuning, Sungai Boyong, Sungai Bedog, Sungai Krasak, Sungai Bebeng, dan Sungai Putih sejauh maksimal 5 km. Sehingga aktivitas masyarakat harus dibatasi terutama di wilayah tersebut, guna mencegah terjadinya korban jiwa. Pada wilayah lain, yaitu Provinsi Khusus Ibukota Jakarta mengalami banjir pada 20 Februari 2021 yang menyebabkan 113 RW yang memiliki kondisi padat permukiman mengalami genangan air banjir. Gempa bumi terjadi di Majene Provinsi Sulawesi Barat pada 15 Januari 2021 dengan kekuatan 6,2 SR mengakibatkan 105 orang meninggal dunia

dan rumah warga mengalami kerusakan akibat goncangan gempa. Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 5 April 2021 mengalami bencana banjir badang hingga menyebabkan 9 kabupaten mengalami dampak berat, kondisi bencana tersebut dipicu oleh badai atau Sinklon Tropis Seroja yang mengakibatkan cuaca ekstrem hingga menimbulkan dampak bencana hidrometeorologi, selain kerusakan infrastruktur akibat bencana ini korban jiwa meninggal mencapai 134 orang. Itulah beberapa contoh kejadian bencana multihazard yang dialami di Indonesia yaitu Provinsi Daerah Khusus Ibukota, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, hingga Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kondisi ini menuntut masyarakat untuk memiliki kapasitas ketahanan dalam menghadapi bencana dan kembali bangkit menata kehidupan kembali. (*)